SIDAK RUTAN KELAS II B MUNTOK, OMBUDSMAN BABEL APRESIASI PELAYANAN WARGA BINAAN DISABILITAS

Kamis, 07 Oktober 2021 - Umi Salamah

MUNTOKÂ - Tim Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung melakukan sidak ke Rutan Kelas II B Muntok, Rabu (06/10/2021). Pada sidak kali ini Tim Ombudsman Babel disambut oleh Kepala Rutan, Abdul Rasyid Meliala. Adapun Tim Ombudsman Babel melakukan sidak demi perbaikan layanan pada rutan.

"Mengingat ini kali pertama Ombudsman Babel melakukan sidak ke Rutan Kelas II B Muntok, kami berharap pelayanan publik termasuk pemenuhan standarnya sudah dipenuhi oleh rutan demi memberikan pelayanan prima bagi warga binaan maupun masyarakat selaku kerabat dan keluarga warga binaan," ujar Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy.

Pada sidak tersebut juga, Ombudsman Babel menyoroti pelayanan untuk warga binaan penyandang disabilitas. Dalam temuannya, Ombudsman Babel melihat pelayanan publik yang didalamnya memuat standar dan sarana pelayanan bagi penyandang disabilitas sudah dipenuhi oleh pihak rutan.

"Kami sangat mengapresiasi pemenuhan standar pelayanan publik yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik khususnya bagi penyandang disabilitas di rutan ini. Mengingat Ombudsman Babel saat ini sangat fokus terhadap pemenuhan layanan bagi disabilitas," tambah Yozar.

Kegiatan sidak ini disambut baik oleh Abdul Rasyid Meliala selaku Kepala Rutan Kelas II B Muntok. Beliau juga berharap ada masukan yang membangun dari Ombudsman Babel demi perbaikan layanan kepada masyarakat.

"Kami sangat senang dan terbuka dengan kedatangan Ombudsman Babel karena dengan begitu kami sadar akan kekurangan dalam hal pelayanan publik. Kedepannya hal tersebut dapat menjadi masukan bagi kami dalam melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik di rutan," ujar Abdul Rasyid.

Dalam kegiatan ini, Ombudsman Babel melihat pemenuhan standar pelayanan publik yang telah dipenuhi adalah toilet untuk penyandang disabilitas, adanya ram dan rambatan, loket pelayanan khusus warga binaan disabilitas yang hendak mengajukan cuti pada akhir masa tahanan, kotak pengaduan, dan sebagainya. Ombudsman Babel berharap hal tersebut dapat menjadi contoh bagi rutan lainnya.

"Secara garis besar, standar pelayanan publik bagi disabilitas sudah dipenuhi oleh pihak rutan, kami berharap hal ini dapat terus ditingkatkan dan dicontoh oleh rutan lainnya mengingat kaum disabilitas cenderung tidak diperhatikan. Hal tersebut demi memberikan pelayanan publik yang berkualitas tanpa diskriminasi," tutup Yozar.Â (Rel)

Â